



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 246 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN PARAHITA EKAPRAYA TAHUN 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang pelaksanaannya menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. bahwa salah satu tujuan pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan cara menerapkan strategi Pengarusutamaan Gender di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai berhasil dalam mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara sistematis dan berkelanjutan, perlu diberikan apresiasi dalam bentuk Penghargaan Parahita Ekapraya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penerima Penghargaan Parahita Ekapraya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN PARAHITA EKAPRAYA TAHUN 2023.

KESATU: ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Parahita Ekapraya Tahun 2023 kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghargaan berupa *trophy* dan sertifikat sesuai kategori penghargaan.
- KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 



Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 246 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN PARAHITA
EKAPRAYA TAHUN 2023

PENERIMA PENGHARGAAN PARAHITA EKAPRAYA TAHUN 2023

A. Kementerian/Lembaga

NO.	INSTANSI	KATEGORI
1.	Kementerian Keuangan	Mentor
2.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Mentor
3.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Mentor
4.	Kementerian Dalam Negeri	Utama
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	Utama
6.	Kementerian Pertanian	Utama
7.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Utama
8.	Kementerian Luar Negeri	Nindya
9.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	Madya
10.	Kementerian Pertahanan	Madya
11.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pratama
12.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Pratama

B. Pemerintah Daerah Provinsi

NO.	PROVINSI	KATEGORI
1.	Provinsi Jawa Timur	Mentor
2.	Provinsi Jawa Tengah	Mentor
3.	Provinsi Banten	Utama
4.	Provinsi DI Yogyakarta	Utama
5.	Provinsi Jawa Barat	Utama
6.	Provinsi DKI Jakarta	Utama



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	PROVINSI	KATEGORI
7.	Provinsi Riau	Nindya
8.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nindya
9.	Provinsi Sumatera Utara	Nindya
10.	Provinsi Lampung	Nindya
11.	Provinsi Sulawesi Selatan	Nindya
12.	Provinsi Kalimantan Timur	Nindya
13.	Provinsi Kepulauan Riau	Nindya
14.	Provinsi Sumatera Barat	Nindya
15.	Provinsi Sumatera Selatan	Madya
16.	Provinsi Bali	Madya
17.	Provinsi Kalimantan Tengah	Madya
18.	Provinsi Jambi	Madya
19.	Provinsi Kalimantan Selatan	Madya
20.	Provinsi Sulawesi Utara	Madya
21.	Provinsi Sulawesi Tengah	Pratama
22.	Provinsi Kalimantan Barat	Pratama
23.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pratama
24.	Provinsi Kalimantan Utara	Pratama
25.	Provinsi Bengkulu	Pratama

C. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO.	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
1.	Kota Semarang	Mentor
2.	Kota Denpasar	Mentor
3.	Kota Surabaya	Mentor
4.	Kota Bandung	Utama
5.	Kota Surakarta	Utama
6.	Kabupaten Rembang	Utama
7.	Kabupaten Sragen	Utama
8.	Kabupaten Gianyar	Utama
9.	Kabupaten Cilacap	Utama
10.	Kabupaten Magelang	Utama
11.	Kota Depok	Utama
12.	Kabupaten Jepara	Utama
13.	Kota Sawah Lunto	Utama
14.	Kabupaten Karawang	Utama
15.	Kota Tangerang Selatan	Utama
16.	Kota Salatiga	Nindya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
17.	Kabupaten Klaten	Nindya
18.	Kota Tangerang	Nindya
19.	Kota Cilegon	Nindya
20.	Kabupaten Bogor	Nindya
21.	Kabupaten Wonosobo	Nindya
22.	Kabupaten Bangka	Nindya
23.	Kabupaten Mojokerto	Nindya
24.	Kota Batam	Nindya
25.	Kota Makassar	Nindya
26.	Kabupaten Demak	Nindya
27.	Kabupaten Garut	Nindya
28.	Kota Kediri	Nindya
29.	Kabupaten Kebumen	Nindya
30.	Kota Kendari	Nindya
31.	Kabupaten Kepulauan Anambas	Nindya
32.	Kabupaten Padang Pariaman	Nindya
33.	Kota Tegal	Nindya
34.	Kabupaten Kendal	Nindya
35.	Kabupaten Trenggalek	Nindya
36.	Kabupaten Bangka Tengah	Nindya
37.	Kabupaten Situbondo	Nindya
38.	Kabupaten Kuningan	Nindya
39.	Kabupaten Gresik	Nindya
40.	Kabupaten Sijunjung	Nindya
41.	Kota Tanjung Pinang	Nindya
42.	Kota Pekalongan	Nindya
43.	Kabupaten Bintan	Nindya
44.	Kabupaten Sleman	Nindya
45.	Kabupaten Kulon Progo	Nindya
46.	Kota Magelang	Nindya
47.	Kabupaten Karimun	Nindya
48.	Kabupaten Purworejo	Nindya
49.	Kota Jakarta Barat	Nindya
50.	Kabupaten Tulang Bawang	Nindya
51.	Kabupaten Banyumas	Nindya
52.	Kota Payakumbuh	Nindya
53.	Kabupaten Jombang	Nindya
54.	Kabupaten Gorontalo	Nindya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
55.	Kota Bukittinggi	Nindya
56.	Kabupaten Siak	Madya
57.	Kota Balikpapan	Madya
58.	Kabupaten Grobogan	Madya
59.	Kabupaten Bandung	Madya
60.	Kabupaten Natuna	Madya
61.	Kabupaten Tulungagung	Madya
62.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Madya
63.	Kabupaten Blora	Madya
64.	Kabupaten Wonogiri	Madya
65.	Kota Pangkal Pinang	Madya
66.	Kota Jambi	Madya
67.	Kabupaten Maros	Madya
68.	Kabupaten Penajam Paser Utara	Madya
69.	Kota Tomohon	Madya
70.	Kabupaten Luwu Timur	Madya
71.	Kota Banjarmasin	Madya
72.	Kabupaten Lampung Tengah	Madya
73.	Kabupaten Pandeglang	Madya
74.	Kabupaten Lebak	Madya
75.	Kota Probolinggo	Madya
76.	Kota Samarinda	Madya
77.	Kabupaten Kolaka	Madya
78.	Kabupaten Sukoharjo	Madya
79.	Kabupaten Tuban	Madya
80.	Kabupaten Boyolali	Madya
81.	Kabupaten Kutai Kartanegara	Madya
82.	Kabupaten Tangerang	Madya
83.	Kabupaten Kudus	Madya
84.	Kota Dumai	Madya
85.	Kota Pontianak	Madya
86.	Kabupaten Pematang	Madya
87.	Kabupaten Banjarnegara	Madya
88.	Kota Batu	Madya
89.	Kabupaten Lumajang	Madya
90.	Kota Metro	Madya
91.	Kabupaten Sinjai	Madya
92.	Kabupaten Pasaman	Madya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

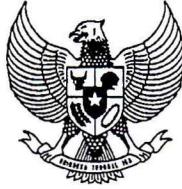
NO.	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
93.	Kabupaten Temanggung	Madya
94.	Kabupaten Tanah Datar	Madya
95.	Kota Madiun	Madya
96.	Kota Mataram	Madya
97.	Kabupaten Pohuwato	Madya
98.	Kabupaten Lima Puluh Kota	Madya
99.	Kabupaten Kubu Raya	Madya
100.	Kota Manado	Madya
101.	Kabupaten Kampar	Madya
102.	Kabupaten Bantul	Madya
103.	Kabupaten Bone	Madya
104.	Kabupaten Bangka Barat	Madya
105.	Kota Serang	Madya
106.	Kabupaten Jembrana	Madya
107.	Kabupaten Deli Serdang	Madya
108.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Madya
109.	Kota Pekanbaru	Madya
110.	Kota Sukabumi	Madya
111.	Kabupaten Madiun	Madya
112.	Kabupaten Ngawi	Madya
113.	Kabupaten Pekalongan	Madya
114.	Kota Pasuruan	Madya
115.	Kabupaten Serang	Madya
116.	Kabupaten Dompu	Madya
117.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Madya
118.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Madya
119.	Kabupaten Kapuas	Madya
120.	Kabupaten Sidoarjo	Madya
121.	Kota Bekasi	Madya
122.	Kota Bandar Lampung	Madya
123.	Kabupaten Pesisir Selatan	Madya
124.	Kabupaten Indragiri Hilir	Madya
125.	Kota Pariaman	Madya
126.	Kabupaten Berau	Madya
127.	Kabupaten Lampung Timur	Madya
128.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Madya
129.	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	Madya
130.	Kota Jakarta Timur	Madya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
131.	Kota Mojokerto	Madya
132.	Kabupaten Kepulauan Meranti	Madya
133.	Kota Solok	Madya
134.	Kabupaten Tapin	Madya
135.	Kabupaten Brebes	Madya
136.	Kabupaten Nganjuk	Madya
137.	Kota Banjar	Madya
138.	Kota Ternate	Pratama
139.	Kabupaten Barru	Pratama
140.	Kabupaten Magetan	Pratama
141.	Kabupaten Pasaman Barat	Pratama
142.	Kabupaten Jember	Pratama
143.	Kabupaten Tebo	Pratama
144.	Kota Palopo	Pratama
145.	Kabupaten Bengkalis	Pratama
146.	Kabupaten Sukabumi	Pratama
147.	Kota Bogor	Pratama
148.	Kabupaten Enrekang	Pratama
149.	Kota Parepare	Pratama
150.	Kabupaten Tapanuli Selatan	Pratama
151.	Kota Prabumulih	Pratama
152.	Kabupaten Bulukumba	Pratama
153.	Kabupaten Luwu Utara	Pratama
154.	Kabupaten Lampung Utara	Pratama
155.	Kota Sibolga	Pratama
156.	Kabupaten Batang Hari	Pratama
157.	Kabupaten Mesuji	Pratama
158.	Kota Kotamobagu	Pratama
159.	Kabupaten Sampang	Pratama
160.	Kota Yogyakarta	Pratama
161.	Kabupaten Cirebon	Pratama
162.	Kabupaten Pati	Pratama
163.	Kabupaten Belitung Timur	Pratama
164.	Kota Cimahi	Pratama
165.	Kabupaten Ponorogo	Pratama
166.	Kota Banjar Baru	Pratama
167.	Kabupaten Bondowoso	Pratama
168.	Kota Gorontalo	Pratama



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
169.	Kabupaten Lamongan	Pratama
170.	Kota Padang Panjang	Pratama
171.	Kabupaten Ciamis	Pratama
172.	Kabupaten Bone Bolango	Pratama
173.	Kabupaten Kediri	Pratama
174.	Kota Blitar	Pratama
175.	Kabupaten Mamuju	Pratama
176.	Kabupaten Batang	Pratama
177.	Kota Jakarta Pusat	Pratama
178.	Kabupaten Gunung Kidul	Pratama
179.	Kabupaten Tegal	Pratama
180.	Kabupaten Banjar	Pratama
181.	Kabupaten Sanggau	Pratama
182.	Kabupaten Paser	Pratama
183.	Kabupaten Pelalawan	Pratama
184.	Kabupaten Belitung	Pratama
185.	Kabupaten Bantaeng	Pratama
186.	Kabupaten Klungkung	Pratama
187.	Kabupaten Dharmasraya	Pratama
188.	Kabupaten Buleleng	Pratama
189.	Kabupaten Bangkalan	Pratama
190.	Kabupaten Kotawaringin Timur	Pratama
191.	Kabupaten Balangan	Pratama
192.	Kabupaten Luwu	Pratama
193.	Kabupaten Agam	Pratama
194.	Kabupaten Rokan Hilir	Pratama
195.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Pratama
196.	Kota Jakarta Utara	Pratama
197.	Kabupaten Muara Enim	Pratama
198.	Kota Sungai Penuh	Pratama
199.	Kabupaten Blitar	Pratama
200.	Kabupaten Sumedang	Pratama
201.	Kabupaten Bungo	Pratama
202.	Kabupaten Bekasi	Pratama
203.	Kabupaten Tabalong	Pratama
204.	Kabupaten Labuhan Batu	Pratama
205.	Kabupaten Nagan Raya	Pratama
206.	Kabupaten Kotawaringin Barat	Pratama



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
207.	Kabupaten Purbalingga	Pratama
208.	Kota Palembang	Pratama
209.	Kabupaten Ogan Ilir	Pratama
210.	Kota Medan	Pratama
211.	Kabupaten Bandung Barat	Pratama
212.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Pratama
213.	Kabupaten Semarang	Pratama
214.	Kabupaten Lingga	Pratama
215.	Kabupaten Lampung Selatan	Pratama
216.	Kabupaten Soppeng	Pratama
217.	Kabupaten Kuantan Singingi	Pratama
218.	Kabupaten Cianjur	Pratama
219.	Kabupaten Tasikmalaya	Pratama
220.	Kota Cirebon	Pratama
221.	Kota Pagar Alam	Pratama
222.	Kabupaten Malang	Pratama
223.	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Pratama
224.	Kabupaten Wajo	Pratama
225.	Kabupaten Probolinggo	Pratama
226.	Kabupaten Pacitan	Pratama
227.	Kota Sabang	Pratama
228.	Kabupaten Banyuwangi	Pratama
229.	Kabupaten Musi Banyuasin	Pratama
230.	Kabupaten Kepahiang	Pratama
231.	Kabupaten Badung	Pratama
232.	Kabupaten Lahat	Pratama
233.	Kabupaten Tabanan	Pratama
234.	Kabupaten Kepulauan Seribu	Pratama
235.	Kabupaten Pasuruan	Pratama
236.	Kabupaten Bojonegoro	Pratama
237.	Kabupaten Sumbawa	Pratama

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI